

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, Herni Sri Nurbayanti, 2004, *Kepailitan di Negeri Pailit*, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Jakarta.
- Asikin, Zainal, 2001, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2005, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gautama, Sudargo, 1998, *Komentar atas Peraturan Kepailitan baru untuk Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Harahap, M. Yahya, 1997, *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hartono, Siti Soemarti, 1993, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda dan Benny K. Harman, 2000, *Analisa Kritis Putusan-Putusan Pengadilan Niaga*, CINLES-Center For Information & Law-Economic Studies, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Yani, Ahmad dan Widjaja, Gunawan, 1999, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Failissement Verordening Staatsblad tahun 1905 Nomor 217 *juncto* *Staatsblad* Tahun 1906 Nomor 348.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Semarang.

C. Internet dan Karya Ilmiah

“Eksistensi Pengadilan Niaga Dan Perkembangannya Dalam Era Globalisasi”,

http://www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/11308/231/

, diakses tanggal 12 Juli 2013.

“Merancang strategi ekonomi nasional dengan meningkatkan usaha mikro sebagai penopang ekonomi bangsa”,

[http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2011/12/18/merancang-](http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2011/12/18/merancang-strategi-ekonomi-nasional-dengan-meningkatkan-usaha-mikro-sebagai-penopang-ekonomi-bangsa-423053.html)

[strategi-ekonomi-nasional-dengan-meningkatkan-usaha-mikro-](http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2011/12/18/merancang-strategi-ekonomi-nasional-dengan-meningkatkan-usaha-mikro-sebagai-penopang-ekonomi-bangsa-423053.html)

[sebagai-penopang-ekonomi-bangsa-423053.html](http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2011/12/18/merancang-strategi-ekonomi-nasional-dengan-meningkatkan-usaha-mikro-sebagai-penopang-ekonomi-bangsa-423053.html), diakses pada

tanggal 14 Juli 2013.

“Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan”,

<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>, diakses pada tanggal 16

Juli 2013.